BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. KESIMPULAN

Kesimpulan dari judul Konflik Kewenangan Pemerintah Kota Surabaya dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo adalah permaslahan ini berawal dari permasalahan terkait pendapatan atau Retrebusi Terminal. Permaslahan ini hanya antar Pemerintahan Daerah dan di fasilitasi oleh Elit Pemerintah daerah yakni Walikota Surabaya dan Bupati Sidoarjo. Dan sedikit orang-orang Pemerintah Surabaya Juga mengikuti dalam permaslahan ini adalah Kepala Dishub Kota Surabaya dan DPRD Kota Surabaya. Awal permaslahan ini adalah Keterlambatan Pemerintah Kota Surabaya dalam membayar Pajak Retrebusi terminal.

Menurut Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo adalah keterlemabatan pembayaran pajak terminal menurut membuat pelayanan publik Kabupaten mengalami terkendala. Oleh sebab itu Kabupaten Sidoarjo mengupayakan Kota Surabaya segera membayar pajak terminal.

Dari permaslahan terminal teori yang berkaitan adalah teori Kekuasaan baik teori kekuasaan yang diambil menurut Ramlan Surbakti taupun dimensi kekuasaann, menjadi kekuasaan semakin kuat adanya Legimitasi Kekuasaan. Legismasi kekuasaan ini berkuasa pada sumber-sumber kekuasaan baik sumber-sumber yang dimiliki ataupun sumber-sumber yang mempegaruhi kelompok lain untuk menuruti keinginan dan tujuan dari kelompok lain yang tidak sesuai. Walaupun ada kewenangan dari sumber pertama untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menguasai sumber-sumber kekuasaan itu namun sumber-sumber kekuasan memiliki tempat dan diamana letak.

Letak dan tempat menyatakan sumber-sumber kekuasaan tidak akan lepas dari faktor masyrakat sekitar ditempat sumber-sumber kekuasaan. Lebih Baiknya Kedua Pemerintah Daerah ini segera diselesaikan masalahnya dan menatap masalah kedepan yakni masalah kewenangan Pemerintah Pusat yang tidak sesuai dengan implementasi kebijakan otonomi daerah.

6.2. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan, KONFLIK KEWENANGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA DAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO DALAM PENGELOLAAN TERMINAL PURABAYA:

1. Saran untuk pemerintah Kota Surabaya

Seharusnya pemerintah Kota Surabaya melakukan proses Negosiasi dengan pemerintah Kabupaten Sidoarjo bukan bertemu dengan Bupati Sidoarjo namun mengajak DPRD Kabupaten ikut andil dalam menyelesaikan konflik dan membuat suatu keputusan bersama.

2. Saran untuk pemerintah Kabupaten Sidoarjo

Saran pemerintah Kabupaten Sidoarjo khusus nya DPRD Kabupaten Sidoarjo agar penyelesian masalah sengketa konflik ini diselesaikan antar kepala daerah tingkat II dari kedua belah pihak agar keputusan tersebut untuk pneyelesian menjadi final. Kekuasaan ini akan menajdi kekuasaan untuk rakyat bukan untuk stake holder atau kepentingan pribadi masing-masing pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

3. Saran untuk peneliti selanjutnya

Saran waktu yang ditempuh mengetahui permasalahn ini agar lebih lama dan tidak terkesan terburu-buru. Untuk peneliti selanjutnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id